


# Sosialisasi Sistem Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha dan Penyedia Jasa Pendukung Angkutan Perairan dilingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta

<sup>1</sup>Sarinah Sihombing\*, <sup>2</sup>Alfais Amin Darmawan, <sup>3</sup>Johanes Kurniawan, <sup>4</sup>Krisman Damanik, <sup>1</sup>Ajik Sudarmaji

<sup>1,2,3,4,5</sup>Manajemen dan Bisnis, Institut Transportasi dan Logistik, Jakarta, Indonesia

Email Corresponding: [sarinah.stmt@gmail.com](mailto:sarinah.stmt@gmail.com)\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Sistem Manajemen Usaha (SMU) Angkutan Perairan Manajemen Resiko Manajemen ISO Pengembangan Kapasitas	Indonesia sebagai poros maritim dunia memegang peranan strategis dalam transportasi laut yang menghubungkan wilayah kepulauan. Namun, pelaku usaha dan penyedia jasa pendukung angkutan perairan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih menghadapi tantangan pengelolaan usaha tradisional dengan pencatatan manual yang kurang terstruktur, meningkatkan risiko operasional dan menghambat akses permodalan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mensosialisasikan Sistem Manajemen Usaha (SMU) berbasis risiko yang mengacu pada standar internasional ISO 9001:2015 dan ISO 31000:2018, guna meningkatkan efektivitas dan daya saing pelaku usaha. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan interaktif, melibatkan wawancara mendalam dan observasi lapangan sebagai dasar pengembangan modul, diikuti sosialisasi tatap muka dan evaluasi menggunakan pre-test/post-test serta kuesioner kepuasan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 10,4%, dengan peningkatan signifikan pada aspek kepatuhan regulasi. Peserta menunjukkan motivasi tinggi untuk menerapkan SMU dalam aktivitas usaha sehari-hari. Kesimpulannya, pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha dan mendukung transformasi sistem manajemen yang profesional dan akuntabel. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah diperlukan untuk memastikan implementasi SMU yang efektif dan berkelanjutan di sektor transportasi perairan.
<b>Keywords:</b> Business Management System Water Transportation Risk Management ISO 9001:2015 Capacity Building	<b>ABSTRACT</b> Indonesia, as a global maritime axis, plays a strategic role in connecting its archipelagic regions through sea transportation. However, businesses and supporting service providers in the water transport sector under the DKI Jakarta Transportation Agency face challenges due to traditional manual management systems that are poorly structured, leading to significant operational risks and limited access to capital. This community service activity aims to socialize of a risk-based Business Management System (BMS) referring to international standards ISO 9001:2015 and ISO 31000:2018 to enhance the effectiveness and competitiveness of business actors. The participatory and interactive method involved in-depth interviews and field observations as a basis for module development, followed by face-to-face socialization and evaluation with pre-test/post-test and participant satisfaction questionnaires. The results showed a 10.4% increase in participant understanding, with the most significant improvement in regulatory compliance. Participants demonstrated strong motivation to implement the BMS in their daily business operations. In conclusion, this community service effectively enhanced managerial capacity and supports a professional and accountable management transformation. Continuous government support is needed to maintain effective and sustainable BMS implementation in the water transport sector.
This is an open access article under the <a href="#">CC-BY-SA</a> license. 	

## I. PENDAHULUAN

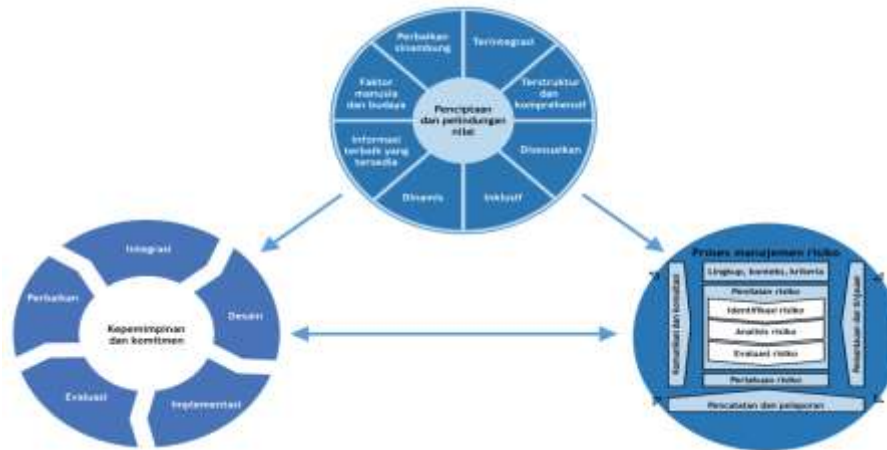
Indonesia berkomitmen menjadi poros maritim dunia dengan kebijakan memperkuat sektor transportasi laut. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 menitikberatkan pada modernisasi pelabuhan, digitalisasi kepelabuhanan, dan pengembangan manajemen risiko berbasis

teknologi. Transportasi laut sangat strategis karena menjadi urat nadi perekonomian dan penghubung antar wilayah kepulauan. Pelaku usaha seperti pemilik kapal, operator, dan penyedia jasa pendukung memegang peranan vital untuk kelancaran distribusi barang dan mobilitas penumpang (Amin & Jufrin, 2020). Namun, banyak pelaku usaha masih menggunakan sistem manajemen tradisional dengan pencatatan manual dan metode intuitif. Kondisi ini diperparah oleh alat dan sistem usang yang memperlambat alur kerja (Guna, 2023). Akibatnya, risiko operasional meningkat, akses modal sulit, dan kinerja usaha terhambat. Hal ini berdampak pada daya saing bisnis dan kualitas layanan pelanggan. Kualitas pelayanan penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa mengurangi hak atau nilai tak berwujud ((Sihombing et al., 2022)

Kerangka regulasi pelayaran di Indonesia diatur dalam UU Pelayaran yang menekankan pengelolaan usaha pelayaran profesional dan berstandar tinggi. Regulasi ini mencakup standar keselamatan, keamanan, serta pembinaan pelayaran rakyat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewirausahaan di sektor angkutan laut (UU No.17 tahun, 2008). Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut berfokus pada upaya untuk memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara massal dengan prinsip-prinsip keselamatan, keamanan, serta kenyamanan yang optimal, sekaligus mendorong pengembangan usaha jasa angkutan laut yang kuat dan berdaya saing dengan dukungan kemudahan permodalan dan insentif fiskal. Selain UU Pelayaran, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang di Perairan, yang mengatur kewajiban penyelenggara angkutan laut untuk memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi penumpang. Dalam peraturan ini, pelaku usaha diwajibkan memiliki sistem manajemen internal yang terorganisir dan efektif untuk menjamin kualitas pelayanan agar standar pelayanan minimal dapat terpenuhi secara konsisten. Kepatuhan pada standar ini tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang, tetapi juga mendukung reputasi dan daya saing pelaku usaha angkutan laut di pasar nasional maupun internasional (Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, 2015).

ISO 9001:2015 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen mutu dengan fokus utama pada pendekatan proses dan penerapan pemikiran berbasis risiko (risk-based thinking). Standar ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis dan operasional, sekaligus menjaga keberlanjutan proses bisnisnya. Pendekatan ini sangat relevan bagi pelaku usaha di sektor maritim, yang sering dihadapkan pada risiko tinggi operasional, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka mengelola risiko yang berdampak pada pelayanan publik dan keselamatan (ISO, 2015). Manajemen mutu hendak memastikan bahwa prosedur, sistem, dan budaya kerja berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan dan keselamatan navigasi (Aziz et al., 2023). Selain itu, standar ISO 31000:2018 memberikan pedoman komprehensif mengenai prinsip-prinsip dan proses manajemen risiko yang efektif serta efisien, yang sangat cocok diterapkan di sektor pelayaran yang mempunyai risiko inheren tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Penerapan sistem manajemen risiko menurut ISO 31000:2018 ini mampu menyediakan kerangka kerja yang solid untuk pengelolaan risiko secara optimal, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk memastikan keamanan, ketahanan, dan kelangsungan operasional bisnis maritim (ISO 31000, 2018). Dengan demikian, integrasi kedua ISO tersebut dalam manajemen maritim menambah nilai strategis dan operasional yang signifikan, memperkuat posisi pelaku usaha dalam menghadapi persaingan global dan tantangan kompleks sektor maritim

Desain kerangka kerja menurut ISO 31000:2018 terdiri dari tiga komponen utama yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 : Manajemen Resiko (SNI ISO 3100)

Disamping itu, pemanfaatan dari SMU memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengelolaan yang cenderung lebih berorientasi kepada regulasi tradisional/ konvensional, sebagai berikut.

Tabel 1 : Pergeseran Paradigma

Aspek	Regulasi Tradisional	Sistem Manajemen Usaha (SMU)
Fokus Utama	Kepatuhan persyaratan minimal administratif.	Manajemen risiko (risk based approach) dan peningkatan kinerja berkelanjutan
Mutu & Keselamatan	Dianggap sebagai biaya kepatuhan.	Dianggap sebagai investasi dan keunggulan kompetitif.
Peran Pelaku Usaha	Bersifat pasif (menunggu instruksi).	Bersifat aktif (mengidentifikasi dan mengelola risiko sendiri).
Konteks Jakarta	Peningkatan volume dan kompleksitas rute perairan membutuhkan standar yang lebih tinggi.	

Tanpa sistem manajemen yang memadai, pelaku usaha dan penyedia jasa angkutan perairan menghadapi berbagai kendala serius yang menghambat operasional bisnis mereka. Kesulitan utama adalah dalam mengukur kinerja usaha secara akurat karena pencatatan manual yang tidak sistematis dan kurangnya indikator kinerja yang jelas. Hal ini menyebabkan evaluasi performa menjadi sulit, sehingga usaha kurang terukur dari sisi efisiensi dan efektivitas. Selain itu, pelaku usaha sering kesulitan mengendalikan biaya operasional yang membengkak akibat minimnya kontrol pengeluaran, yang berpotensi menyebabkan pemborosan sumber daya. Kondisi tersebut juga mengganggu perencanaan strategis karena data keuangan dan operasional yang tidak akurat membatasi kemampuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pelatihan manajemen yang terstruktur dan sumber daya yang memadai sangat dibutuhkan agar pelaku usaha siap mengadopsi sistem manajemen modern yang lebih efisien dan berstandar. Pendekatan ini memudahkan transisi dari sistem lama sekaligus meminimalisir resistensi terhadap perubahan, sehingga meningkatkan daya saing usaha. Dengan pendekatan ini, transisi dari sistem tradisional ke sistem yang lebih berstandar dapat terjadi lebih mulus, serta mengurangi resistensi dari para pelaku usaha terhadap perubahan (Guna, 2023).

Oleh karena itu, tim PkM merasa perlu untuk melakukan sosialisasi SMU berbasis risiko yang dirancang khusus, adaptif, dan mudah digunakan oleh mitra di lapangan, dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial bagi peserta sosialisasi yaitu para pelaku usaha dan penyedia jasa pendukung angkutan perairan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui penerapan SMU berbasis risiko, sehingga usaha mereka menjadi lebih efisien, akuntabel, sesuai standar mutu dan berdaya saing. Pentingnya sosialisasi strategi sistem manajemen usaha yang dirancang adaptif dan praktis sangat menentukan peningkatan kompetensi manajerial serta performa bisnis UMKM. Pendekatan pelatihan

yang terstruktur membantu transisi ke sistem mutu berbasis risiko sehingga usaha menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berdaya saing"(Primadi Candra Susanto et al., 2025). Kualitas Layanan adalah mengacu pada tingkat kepuasan yang dimiliki klien terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis atau organisasi. Aspek kualitas layanan mencakup komunikasi, respons, keandalan, kecepatan, dan kapasitas untuk memenuhi atau melampaui harapan klien. Dalam masa persaingan yang ketat, kemampuan perusahaan untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi sangat penting bagi keberhasilannya(Damanik et al., 2024). Perusahaan harus memperhatikan kualitas produk, keunikan merek, reputasi perusahaan, dan ikatan emosional dengan pelanggan agar membentuk citra merek yang kuat dan berdampak pada model manajemen usaha(Darmawan, 2025).

## II. MASALAH

Masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha dan penyedia jasa pendukung angkutan perairan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Manajemen yang Tradisional: Mayoritas pelaku usaha cenderung menjalankan sistem manajemen usaha secara tradisional, dengan model pencatatan manual, belum terstruktur, dan hanya mengandalkan metode yang bersifat intuitif.
2. Minimnya Standar Profesional: Kondisi ini menunjukkan kurangnya profesionalisme dan ketidakpatuhan terhadap standar pengelolaan usaha yang modern.  
dimana 2 masalah dapat berdampak kepada :
  1. Risiko Operasional Tinggi: Pendekatan tradisional menyebabkan risiko operasional yang tinggi dalam bisnis pelayaran yang inheren berisiko.
  2. Hambatan Akses Permodalan: Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan (kredit/investasi) karena manajemen keuangan dan operasional yang tidak terstruktur dan tidak akuntabel.
  3. Inefisiensi dan Sulitnya Pengukuran Kinerja: Ketiadaan sistem manajemen yang memadai berdampak pada sulitnya mengukur kinerja, mengidentifikasi pembengkakan biaya operasional, merencanakan strategi pengembangan bisnis, dan sering terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
  4. Daya Saing Rendah: Secara keseluruhan, kondisi ini menghambat upaya optimalisasi kinerja usaha dan menurunkan daya saing mereka di sektor angkutan laut nasional.

## III. METODE

Kegiatan PkM ini dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha perairan dan penyedia jasa pendukung angkutan perairan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai peserta sosialisasi ini. Metode yang digunakan pada kegiatan PkM ini bersifat Partisipatif dan Interaktif yaitu penggunaan metode yang lebih mengedepankan pendekatan dalam sosialisasi atau pelatihan yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif dari penyampaian materi yang diberikan, tetapi juga berperan serta aktif dalam diskusi, *sharing idea*, pengambilan keputusan, dan praktek langsung berkaitan dengan SMU berbasis risiko.

Dalam melaksanakan PkM, Tim PkM menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan
  - a) Melakukan koordinasi (perkenalan dan perijinan) dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
  - b) Menentukan materi sosialisasi yang akan diberikan
  - c) Menentukan peserta sosialisasi
  - d) Menyusun jadwal, menentukan lokasi, serta menyiapkan materi sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami. Khusus untuk kegiatan penyusunan materi, dilakukan dengan langkah awal yaitu melakukan analisis situasi dan indentifikasi masalah, dimana Tahapan ini melibatkan dua metode pengumpulan data utama: wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dan observasi langsung di lapangan (*field observation*) (Ruslan, 2023). Wawancara dilakukan secara terstruktur namun fleksibel dengan para pemilik usaha, manajer operasional, dan staf administrasi untuk menggali informasi kualitatif mengenai praktik manajemen yang sedang berjalan. Sementara itu,

observasi lapangan Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. memungkinkan tim pengabdian untuk memvalidasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan menyaksikan secara langsung dinamika operasional sehari-hari, alur kerja, serta tantangan fisik yang ada. Kemudian Tim PkM, mulai melakukan Penyusunan Modul dan Pengembangan SMU berbasis risiko yang mengacu pada standar ISO (ISO 31000, 2018) dan ISO berbasis mutu yang mengacu kepada standar (ISO, 2015).

## 2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

- a) Sosialisasi Tatap Muka: Penyampaian materi secara langsung kepada para pelaku usaha dan penyedia jasa pendukung angkutan perairan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
- b) Diskusi dan Tanya

## 3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Tahap evaluasi dan monitoring merupakan komponen esensial dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan dampak dari kegiatan PkM ini. Pada tahap ini, dilakukan melalui observasi terstruktur, pre-test/post-test, dan kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kepatuhan regulasi (Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021, 2021) serta dampak nyata kegiatan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada Hari Rabu, tanggal 12 November 2025, bertempat di fasilitas Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Lokasi ini dipilih secara strategis untuk memfasilitasi aksesibilitas para peserta dan menegaskan dukungan institusional dari pemerintah daerah terhadap inisiatif ini. Jumlah peserta sosialisasi tercatat sebanyak 29 orang, yang merupakan perwakilan aktif dari beragam entitas pelaku usaha dan penyedia jasa pendukung angkutan perairan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kehadiran peserta yang beragam ini menciptakan dinamika diskusi yang kaya, memungkinkan berbagi pengalaman antar pelaku usaha dengan skala dan jenis layanan yang berbeda.

Fokus utama hambatan substantif yang mereka hadapi dalam operasional sehari-hari, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kendala Administrasi dan Pencatatan: Mayoritas mitra masih mengandalkan metode pencatatan manual berbasis buku kas atau *nota* fisik. Pendekatan ini rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*), sulit untuk diaudit, dan menghambat pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha seringkali tidak jelas.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknologi digital dasar. Staf seringkali tidak memiliki pelatihan formal dalam manajemen bisnis modern, manajemen risiko, atau kepatuhan regulasi.
3. Kesulitan Akses Permodalan: Akibat ketiadaan laporan keuangan yang terstruktur dan akuntabel, UMKM kesulitan memenuhi persyaratan administrasi yang diminta oleh lembaga perbankan atau keuangan untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau investasi.
4. Inefisiensi Operasional dan Risiko: Manajemen jadwal perawatan armada yang tidak terstruktur meningkatkan risiko kegagalan teknis di perairan, mengancam keselamatan, dan menyebabkan kerugian finansial akibat penundaan layanan.

Selain mengidentifikasi hambatan internal, potensi peningkatan kapasitas usaha juga dievaluasi secara kritis dengan merujuk pada kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia. Evaluasi kepatuhan ini secara spesifik merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: Analisis ini memastikan bahwa solusi sistem manajemen usaha yang diusulkan selaras dengan amanat UU terkait standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim, serta aspek pembinaan usaha pelayaran rakyat (UU No. 17 tahun, 2008).
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang di Perairan: Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi tolok ukur penting untuk

memastikan bahwa perbaikan manajemen internal secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang diterima oleh penumpang, menjamin aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2015).

Kegiatan PKM ini berhasil dilaksanakan dengan antusiasme dan partisipasi yang sangat tinggi dari peserta sosialisasi yaitu para pelaku usaha dan jasa pendukung angkutan perairan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pada tahap sosialisasi, terlihat adanya peningkatan pemahaman dari peserta sosialisasi mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan usaha, khususnya pencatatan transaksi yang terstruktur dengan baik. Peserta juga semakin memahami pentingnya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha sebagai langkah krusial untuk menghindari kekeliruan pengelolaan dana yang dapat berujung pada masalah likuiditas dan penurunan profitabilitas. Selain itu, materi tentang penjadwalan perawatan armada kapal mendapatkan respon positif karena mitra menyadari bahwa perawatan rutin sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan usaha dan keselamatan operasional.



Gambar 2a. Dokumentasi foto kegiatan selama kegiatan sosialisasi



Gambar 2b. Dokumentasi foto kegiatan selama kegiatan sosialisasi

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada sebanyak 29 peserta, terdapat peningkatan penguasaan materi. Hal ini yang menjadi indikator utama keberhasilan kegiatan pelatihan tersebut. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari rata-rata skor peserta yang naik secara substansial, membuktikan efektivitas metode pelatihan dan pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh tim. Data hasil evaluasi tersebut disajikan dalam Tabel 2 untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai pencapaian tujuan pembelajaran. Kesadaran mitra terhadap pentingnya manajemen usaha yang baik semakin meningkat, dan mereka tampak termotivasi untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam aktivitas bisnis sehari-hari, sehingga diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan pada usaha angkutan pelayaran perairan.



Tabel 2. Hasil Evaluasi Peningkatan Pemahaman Peserta

Materi Evaluasi	Skor Pre-test	Rata-rata	Skor Post-test	Rata-rata	Peningkatan (%)
Pencatatan Keuangan Terstruktur		60	65		8.3%
Pemisahan Keuangan Pribadi & Usaha		58	63		8.6%
Manajemen Operasional Kapal		55	60		9.1%
Pengelolaan Risiko Bisnis		50	55		10.0%
Kepatuhan Regulasi		66	75		15,4%
Rata-rata keseluruhan		57.6	63.6		10.4%

Skor rata-rata pre-test menunjukkan tingkat pemahaman awal peserta *sebelum* mengikuti sesi pelatihan. Angka 57.6 mengindikasikan bahwa secara kolektif, pemahaman dasar peserta terhadap materi yang diajarkan berada pada tingkat yang cukup rendah atau sedang. Terdapat variasi pemahaman yang jelas, di mana "Pengelolaan Risiko Bisnis" adalah materi yang paling kurang dipahami (skor 50), sedangkan "Kepatuhan Regulasi" adalah materi yang paling dipahami sejak awal (skor 65). Sedangkan Skor rata-rata post-test menunjukkan tingkat pemahaman peserta *setelah* menyelesaikan sesi pelatihan. Angka 63.6 menunjukkan adanya peningkatan yang positif pada pemahaman secara keseluruhan dibandingkan dengan skor pre-test. Peningkatan terjadi di semua materi, dengan peningkatan paling menonjol pada "Kepatuhan Regulasi" (mencapai skor 75).

Perbandingan antara rata-rata skor pre-test (57.6) dan post-test (63.6) menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 10.4% secara keseluruhan. Hasil ini menyimpulkan bahwa program pelatihan yang dilaksanakan telah efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta di kelima materi tersebut. Meskipun skor rata-rata post-test masih berada di kisaran cukup (di atas 60), hasil ini menjadi dasar bahwa intervensi pelatihan memberikan dampak positif yang terukur.

Rumusan penilaian baik pre-test maupun post test yaitu :

Secara keseluruhan, pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran strategis tentang perlunya manajemen usaha yang profesional dan sistematis di sektor pelayaran rakyat. Keberhasilan ini menunjukan potensi besar dari program pengabdian masyarakat sebagai sarana transfer ilmu yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan usaha yang lebih efisien, akuntabel, dan berdaya saing di tengah tantangan kompetisi dan regulasi yang terus berkembang di sektor transportasi laut nasional. Dari hasil evaluasi kepuasan peserta terhadap kegiatan sosialisasi pada materi dan fasilitator, hasilnya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta Sosialisasi

Aspek Evaluasi	Nilai Rata-Rata (Skala 1-5)	Kategori
Kepuasan terhadap Materi	3.7	Puas

Aspek Evaluasi	Nilai Rata-Rata (Skala 1-5)	Kategori
Kepuasan terhadap Fasilitator	3.9	Puas

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai kepuasan peserta terhadap materi sosialisasi mendapatkan skor rata-rata 3.7 pada skala Likert 1-5, yang tergolong dalam kategori "Puas". Sedangkan kepuasan terhadap kinerja fasilitator sedikit lebih tinggi, yaitu 3.9, juga masuk dalam kategori "Puas". Nilai ini mencerminkan bahwa peserta merasa materi yang disampaikan cukup relevan dan berguna, namun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek kedalaman materi dan penerapan praktisnya. Demikian pula, fasilitator dinilai mampu menyampaikan materi dengan cara yang cukup baik, menjaga interaksi yang efektif dengan peserta, namun mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan untuk pendalaman tertentu atau penyesuaian dengan karakter peserta.

Evaluasi ini konsisten dengan data *post-test* yang menunjukkan peningkatan pemahaman yang ada namun tidak terlalu signifikan dibandingkan hasil *pre-test*. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada kemajuan, masih diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan dan pendampingan agar pemahaman dan penerapan SMU oleh pelaku usaha dapat lebih optimal. Analisis kepuasan semacam ini dapat menjadi bahan referensi penting untuk penyempurnaan metode pelatihan, materi, dan pendekatan fasilitator di masa mendatang agar hasil pembelajaran semakin maksimal.

## V. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi SMU bagi pelaku usaha dan penyedia jasa pendukung angkutan pelayaran perairan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah berhasil mencapai tujuannya dengan sangat positif. Melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan kapasitas manajerial yang signifikan di kalangan mitra. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya pengelolaan usaha yang profesional dan efisien, sejalan dengan amanat regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta standar internasional yang mencakup ISO 9001 yang mengatur Sistem Manajemen Mutu dan ISO 31000 tentang manajemen risiko. Kesadaran ini tercermin dalam praktik bisnis mitra yang semakin terorganisir dan sistematis dalam mengelola berbagai aspek usaha, mulai dari pencatatan keuangan hingga perawatan armada kapal.

Meskipun dalam tahap awal sosialisasi terdapat beberapa tantangan terkait konsistensi penerapan SMU, terutama dalam hal adaptasi teknologi dan pengelolaan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, proses sosialisasi dan pelatihan yang intensif berhasil memotivasi pelaku usaha untuk melakukan perubahan positif. Fasilitator menggunakan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan yang memungkinkan mitra untuk mengadopsi sistem manajemen dengan lebih mudah dan relevan. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi menuju manajemen usaha yang terstruktur bukan hanya sebuah teori, tetapi juga dapat diwujudkan secara praktis dan berdampak nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini telah mampu mendorong transformasi positif dalam pengelolaan usaha angkutan pelayaran perairan, meningkatkan profesionalisme dan daya saing pelaku usaha dan jasa pendukung angkutan perairan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Keberhasilan ini juga menjadi pijakan penting bagi pelaksanaan program serupa di daerah lain, sekaligus sebagai model penerapan SMU yang adaptif dan mudah diterapkan. Melalui penguatan kapabilitas manajerial dan dukungan teknologi digital, diharapkan para pelaku usaha dan jasa pendukung angkutan perairan khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mampu tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi maritim nasional. Selain itu perlu adanya dukungan dari Pemerintah cq. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mendukung terus upaya sosialisasi secara berkelanjutan, panduan teknis dan



pelaksanaan pengawasan berbasis sistem yang adil dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., & Jufrin. (2020). Peranan Pengangkutan Laut Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Indonesia The Role of Sea Transportation as a Transportation Facility for Indonesian Communities. *Jurnal Fundamental*, 9(2), 193.
- Aziz, A. A., Mu'man, & Mashartanto, A. A. (2023). Jurnal Cakrawala Bahari. *Jurnal Cakrawala Bahari*, 6(2), 93–98.
- Damanik, K., Sinaga, M., Sihombing, S., Hidajat, M., & Prakoso, O. S. (2024). Pengaruh Kualitas Layanan, Kebijakan Publik dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 76–85. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i2.1834>
- Darmawan, A. A. (2025). *Determining Passenger Satisfaction on Passenger Ships : An Analysis of Excellent Service , Punctuality , and Infrastructure*. 2(4), 379–388.
- Guna, M. (2023). Matemar: Jurnal Matemar. *Researchgate.Net*, 32–43. [https://www.researchgate.net/profile/Kundori-Kundori/publication/355843108\\_Manajemen\\_Perawatan\\_Oil\\_Water\\_Separator\\_OWS\\_Guna\\_Mencegah\\_Pencemaran\\_Di\\_Laut\\_Pada\\_KM\\_LAWIT/links/6180c979a767a03c14e1c8ed/Manajemen-Perawatan-Oil-Water-Separator-OWS-Guna-Mencegah-](https://www.researchgate.net/profile/Kundori-Kundori/publication/355843108_Manajemen_Perawatan_Oil_Water_Separator_OWS_Guna_Mencegah_Pencemaran_Di_Laut_Pada_KM_LAWIT/links/6180c979a767a03c14e1c8ed/Manajemen-Perawatan-Oil-Water-Separator-OWS-Guna-Mencegah-)
- ISO. (2015). Standar Internasional ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan. *Jurnal Sipil Statik*, 1–60. [https://diploma.chemistry.uui.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/4.-Standard-ISO-9001\\_2015-2-bahasa.pdf](https://diploma.chemistry.uui.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/4.-Standard-ISO-9001_2015-2-bahasa.pdf)
- ISO 31000. (2018). *BS ISO 31000:2018(E) SECOND EDITION BS ISO 31000:2018(E) SECOND EDITION BS ISO 31000: 2018 (E) EDISI KEDUA Contents*. 2018. [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 35 Tahun 2015 Tentang Penilaian Kinerja Keselamatan Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate)*. 1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103413/permenhub-no-35-tahun-2015>
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021. (2021). Peraturan Menteri Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021*, 778.
- Primadi Candra Susanto, Olfebri Olfebri, Aang Gunawan, Basri Fahriza, Reza Fauzi Jaya Sakti, Agus Suhendra, Alfais Amin Darmawan, & Rohana Sitanggang. (2025). Socialization of Strategies for Building MSME Businesses by Following Digitalization Promotion Trends in a Village. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 3(4), 244–255. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v3i4.2180>
- Ruslan, U. N. K. U. R. (2023). 1483-Article Text-6874-1-10-20231211. *Penelitian Grounded Theory: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Metode Pengumpulan Dan Analisis Data*, 6, 699–708.
- Sihombing, S., Nirmala, A., Benned, M., Tasran, C., & Budiman, C. (2022). Penerapan Protokol Kesehatan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Penumpang di Bandara Internasional Soekarno Hatta Implementation of Health Protocols and Service Quality on Passenger Satisfaction at Soekarno Hatta International Airport. *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 19(1), 28–44. <https://doi.org/10.52186/aviasi.v18i1>
- UU No.17 tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, 1–205.